

Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi

Analysis of Factors That Affect The Absorption of The Budget in Cimahi City Government

Rika Septi Rahmawati

Program Studi D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan, Politeknik Negeri Bandung

Email : rika.septi.amp16@polban.ac.id

Jouzar Farouq Ishak

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung

Email : jouzar.farouq.@polban.ac.id

Abstract: *This study aims to determine the effect of budget planning, budget implementation, regulation, human resources, and procurement of goods and services to the absorption of the expenditure budget in Government of Cimahi. And to find out the obstacles that cause the absorption of the budget and how the solution are to overcome these obstacles. This research is a quantitative research. The data source used is primary data obtained through questionnaire and interviews. The questionnaires will be distributed to 27 Regional Apparatus Organization (OPD) in the Government of Cimahi. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The result of the research partially show that budget planning, budget implementation, regulation, and human resources have no effect on the absorption of the expenditure budget in the Government of Cimahi. Meanwhile simultaneously it shows that budget planning, budget implementation, regulation, human resources, and procurements of goods and services have a positive and significant effect on the absorption of the expenditure budget in the Government of Cimahi.*

Keywords: *Budget Planning, Budget Implementation, Regulation, Human Resources, Procurements of Goods and Services, Budget Absorption*

1. Pendahuluan

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, semua urusan yang pada awalnya dikelola oleh pemerintah pusat kini dilimpahkan kepada pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pelimpahan tersebut dilakukan karena pemerintah pusat menganggap bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui dan paham akan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah ini, berarti bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri terkait pemerintahannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemberlakuan otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk dapat mengelola keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD disusun dengan tujuan supaya kegiatan penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan daerahnya dan biaya yang dikeluarkan tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan.

Seiring dengan bergulirnya era otonomi daerah, terdapat sebuah fenomena yang menarik

yaitu rendahnya tingkat serapan anggaran dan serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun. Fenomena rendahnya tingkat serapan anggaran terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dan terus terjadi setiap tahunnya, hal ini dibuktikan dengan kecenderungan persentase penyerapan anggaran yang kurang dari 75% pada akhir triwulan III. Idealnya penyerapan anggaran itu dapat terjadwal, yaitu 25% pada triwulan I, 50% pada triwulan II, 75% pada triwulan III, dan 100% pada triwulan IV (BPKP, 2011). Kegagalan target penyerapan anggaran berakibat pada hilangnya manfaat belanja, karena tidak semua dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan (*idle money*). Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran.

Fenomena rendahnya tingkat serapan anggaran ini terjadi di Kota Cimahi. Berdasarkan data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diketahui bahwa realisasi anggaran belanja pada triwulan III tahun 2018 baru mencapai Rp 830.578.093.845 dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 1.691.773.488.737,46 atau baru mencapai 49,10%. Data ini menjelaskan bahwa daya serap anggaran belanja Pemerintah Kota Cimahi belum optimal karena belum sesuai dengan target yang diinginkan. Optimalisasi anggaran perlu dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut agar berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja secara ekonomi, efisien, dan efektif (*value for money*). Sehingga dapat meminimalkan kemungkinan realisasi pelaksanaan anggaran belanja yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dinilai melalui berbagai indikator, salah satunya adalah penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran dikatakan baik apabila dapat merealisasikan anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Menurut Elim (2018) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran diantaranya yaitu faktor perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi. Sedangkan menurut Hasni dan Basukianto (2016) faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah faktor perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia, regulasi, dan proses pencairan dana. Hasil penelitian Ramdhani dan Anisa (2017) dan Zarinah (2016) menyatakan bahwa perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Pada penelitian ini, peneliti menyoroti beberapa faktor yang cukup dominan dalam mempengaruhi penyerapan anggaran diantaranya perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, sumber daya manusia, dan pengadaan barang dan jasa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, sumber daya manusia, dan pengadaan barang dan jasa. Dan untuk mengetahui kendala yang menyebabkan penyerapan anggaran belanja tidak optimal serta untuk mengetahui solusi dalam mengatasi penyerapan anggaran belanja yang tidak optimal. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus pada faktor perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, sumber daya manusia, dan pengadaan barang dan jasa, serta kendala yang menyebabkan penyerapan anggaran belanja tidak optimal dan solusinya.

2. Kajian Pustaka

2.1 Anggaran dan Penganggaran Sektor Publik

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara (UU No. 17 Tahun 2003). Menurut Mardiasmo (2002) anggaran sektor publik adalah instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. Penganggaran dalam sektor publik harus memperhatikan efektif, efisien, dan

ekonomis sehingga perencanaan dalam anggaran tidak mengagalkan perencanaan yang telah disusun.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (UU No.32 Tahun 2004). APBD memiliki peran penting terutama dalam mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah dan itu tercermin dalam 6 fungsi anggaran, yaitu fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Belanja daerah menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

2.3 Penyerapan Anggaran

Menurut Ramadhani dan Anisa (2017) penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyerapan anggaran yang rendah bukan merupakan satu-satunya indikator untuk menilai keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah, namun pemerintah daerah tetap harus menaruh perhatian terhadap ini. Apabila hal ini terus terjadi, dapat dipastikan target kinerja yang telah ditetapkan tidak tercapai, dan ini berarti ada uang pemerintah daerah yang menganggur yang seharusnya dapat diinvestasikan pada tempat-tempat yang lebih produktif (BPKP, 2011).”

2.4 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran

Menurut Zarinah (2016) perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Perencanaan anggaran memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan anggaran, sehingga semakin baik perencanaan maka akan semakin baik penyerapan anggaran. Oleh karena itu, menurut Ramadhani dan Setiawan (2019) apabila konsep perencanaan tidak matang akan berdampak pada program kerja yang menyebabkan penyerapan anggaran menjadi lambat.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011). Menurut Rusmana (2012) pelaksanaan anggaran merupakan tahapan yang dimulai sejak APBD disahkan melalui peraturan daerah pada setiap akhir tahun sebelum tahun anggaran baru dimulai. Walaupun perencanaan sudah disusun dengan baik tetapi jika dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala atau hambatan maka akan mengakibatkan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal ataupun tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga sangat mungkin realisasi anggaran menjadi lambat dan tidak tepat waktu.

Menurut Bastian (Ramadhani dan Setiawan, 2019) regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan, maupun organisasi sosial lainnya. Regulasi digunakan oleh organisasi publik untuk mewujudkan kebijakan organisasi dalam menghadapi isu dan permasalahan yang ada. Namun dikarenakan banyaknya aturan yang berubah secara cepat sementara waktu yang tersedia tidak terlalu banyak, sehingga dalam pelaksanaan anggaran mengalami kendala dalam

pengimplementasiannya dari suatu kegiatan yang menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran di instansi pemerintah (Ramadhani dan Setiawan, 2019).

Organisasi sektor privat maupun publik perlu membangun sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang tinggi. Menurut Mastuti (2017) SDM yang berkompentensi tinggi akan menjadi keunggulan tersendiri dalam sebuah organisasi sekaligus sebagai pendukung daya saing organisasi dalam era globalisasi dan menghadapi lingkungan kerja serta kondisi sosial masyarakat yang mengalami perubahan yang dinamis. Malahayati (2015) mengatakan bahwa kapasitas SDM akan berpengaruh pada tingkat serapan anggaran. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan SDM seperti memberikan pelatihan/diklat karena akan mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan yang berdampak terhadap penyerapan anggaran.

Belanja pengadaan barang dan jasa memiliki porsi yang cukup besar dalam pencapaian tujuan otonomi daerah karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, namun sayang karena penyerapannya sering mengalami kendala. Proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien akan mempermudah proses penyerapan anggaran (Elim, 2018).

2.5 Kerangka Pemikiran

Penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk pemerataan dan perimbangan dalam pengelolaan sumber daya nasional, agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan diantara satu daerah dengan daerah lainnya. Sehingga diturunkanlah UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah, agar tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah dapat tercapai. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, agar tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah dapat dicapai. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, setiap daerah diharapkan mampu untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri, sehingga dibuatlah PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan adanya PP ini diharapkan daerah dapat mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab. Hasil penelitian Zarinah (2016) menemukan bahwa perencanaan anggaran dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran. Sedangkan hasil penelitian Elim (2018) dan Hasni (2016) menemukan bahwa pelaksanaan anggaran, regulasi, dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 28 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Cimahi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampling jenuh, yaitu semua anggota populasi sebanyak 27 OPD karena salah satunya telah menjadi BLU. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berbentuk angka atau bilangan yang dapat diolah atau dianalisis menggunakan perhitungan statistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penyebaran kuesioner dan wawancara. Kuesioner akan dibagikan kepada 6 responden pada masing-masing perangkat daerah yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran (BP), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

Analisis data dengan mentransformasikan data skala ordinal menjadi skala interval dengan menggunakan teknik MSI. Analisis data dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Uji kualitas data dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis deskriptif. Uji

hipotesis dilakukan setelah uji asumsi klasik serta setelah itu digunakan uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F) serta perhitungan koefisien determinasi (R^2).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Pada penelitian ini data yang digunakan menggunakan data primer yaitu berupa kuesioner yang disebar pada 27 OPD Kota Cimahi. Jumlah kuesioner yang disebar yaitu sebanyak 152 kuesioner, dengan pertimbangan setiap masing-masing perangkat daerah mendapatkan sebanyak 6 kuesioner. Dari semua kuesioner yang telah disebar, sebanyak 1 kuesioner tidak dikembalikan dan 6 kuesioner tidak diisi oleh responden.

4.2. Analisis Deskriptif

1. Perencanaan Anggaran

Hasil penelitian responden terhadap variabel perencanaan anggaran menghasilkan nilai rata-rata item sebesar 3,72 yang berarti jawaban responden berada pada rentang jawaban sering.

2. Pelaksanaan Anggaran

Hasil penelitian responden terhadap variabel pelaksanaan anggaran menghasilkan nilai rata-rata item sebesar 3,25 yang berarti jawaban responden berada pada rentang jawaban kadang-kadang.

3. Regulasi

Hasil penelitian responden terhadap variabel regulasi menghasilkan nilai rata-rata item sebesar 3,06 yang berarti jawaban responden berada pada rentang jawaban kadang-kadang.

4. Sumber Daya Manusia

Hasil penelitian responden terhadap variabel sumber daya manusia menghasilkan nilai rata-rata item sebesar 3,55 yang berarti jawaban responden berada pada rentang jawaban sering.

5. Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil penelitian responden terhadap variabel pengadaan barang dan jasa menghasilkan nilai rata-rata item sebesar 3,05 yang berarti jawaban responden berada pada rentang jawaban kadang-kadang.

6. Penyerapan Anggaran Belanja

Hasil penelitian responden terhadap variabel penyerapan anggaran belanja menghasilkan nilai rata-rata item sebesar 3,10 yang berarti jawaban responden berada pada rentang jawaban kadang-kadang.

4.3. Uji Kualitas Data

Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh item pernyataan yang mewakili semua variabel menunjukkan bahwa nilai r_{hitung} masing-masing setiap item pernyataan lebih besar dari r_{tabel} yaitu sebesar 0,1582. Angka tersebut menunjukkan bahwa masing-masing item pernyataan pada variabel telah memenuhi kriteria uji validitas, sehingga semua pernyataan kuesioner mengenai penelitian ini valid.

Berdasarkan hasil uji reliabel, menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* perencanaan anggaran (X_1) sebesar 0,705, pelaksanaan anggaran (X_2) sebesar 0,612, regulasi (X_3) sebesar 0,610, sumber daya manusia (X_4) sebesar 0,666, pengadaan barang dan jasa (X_5) sebesar 0,680, dan penyerapan anggaran belanja (Y) sebesar 0,611. Maka variabel-variabel tersebut dapat dinyatakan reliabel, karena setiap variabel *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60.

4.4. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas, dapat dilihat hasil Kolmogorov-Smirnov Test dengan nilai signifikansi 0,085 berarti angka tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, dapat dilihat hasil nilai *tolerance* dari perencanaan anggaran (X_1) sebesar 0,843, pelaksanaan anggaran (X_2) sebesar 0,882, regulasi (X_3) sebesar 0,804, sumber daya manusia (X_4) sebesar 0,762, pengadaan barang dan jasa (X_5) sebesar 0,746 nilai tersebut $> 0,10$. Nilai VIF pada variabel perencanaan anggaran (X_1) sebesar 1,187, pelaksanaan anggaran (X_2) sebesar 1,134, regulasi (X_3) sebesar 1,243, sumber daya manusia (X_4) sebesar 1,313, pengadaan barang dan jasa (X_5) sebesar 1,360 nilai tersebut < 10 . Maka, dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinieritas diantara seluruh variabel independennya.

3. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada grafik scatterplot, heteroskedastisitas terjadi apabila terdapat titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, sedangkan jika tidak ada pola titik-titik yang jelas serta menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5. Uji Hipotesis

4.5.1 Uji t

Berdasarkan uji t, maka hasil yang didapat adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh perencanaan anggaran secara parsial terhadap penyerapan anggaran belanja
Diperoleh $1,317 < 1,976$ yang berarti perencanaan anggaran secara parsial tidak berpengaruh. Kemudian nilai signifikansi yaitu $0,190 > 0,05$ maka perencanaan anggaran secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan. Sehingga perencanaan anggaran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja.
2. Pengaruh pelaksanaan anggaran secara parsial terhadap penyerapan anggaran belanja
Diperoleh $1,107 < 1,976$ yang berarti pelaksanaan anggaran secara parsial tidak berpengaruh. Kemudian nilai signifikansi yaitu $0,207 > 0,05$ maka pelaksanaan anggaran secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan. Sehingga pelaksanaan anggaran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja.
3. Pengaruh regulasi secara parsial terhadap penyerapan anggaran belanja
Diperoleh $1,688 < 1,976$ yang berarti regulasi secara parsial tidak berpengaruh. Kemudian nilai signifikansi yaitu $0,094 > 0,05$ maka regulasi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan. Sehingga regulasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja.
4. Pengaruh sumber daya manusia secara parsial terhadap penyerapan anggaran belanja
Diperoleh $1,770 < 1,976$ yang berarti sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh. Kemudian nilai signifikansi yaitu $0,79 > 0,05$ maka sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan. Sehingga sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja.
5. Pengaruh pengadaan barang dan jasa secara parsial terhadap penyerapan anggaran belanja
Diperoleh $3,976 > 1,976$ yang berarti pengadaan barang dan jasa secara parsial berpengaruh. Kemudian nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$ maka pengadaan barang dan jasa secara parsial berpengaruh secara signifikan. Sehingga pengadaan barang dan jasa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja.

4.5.2 Uji F

Berdasarkan uji F diperoleh hasil sebesar $11,670 > 2,28$ maka perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, sumber daya manusia, dan pengadaan barang dan jasa secara simultan berpengaruh. Kemudian nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka secara simultan berpengaruh secara signifikan. Sehingga perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, sumber daya manusia, dan pengadaan barang dan jasa secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja.

Persamaan yang dihasilkan dari analisis regresi linier adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,773 + 0,077X_1 + 0,096X_2 + 0,0110X_3 + 0,0112X_4 + 0,0197X_5 + e$$

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,283 yang berarti besarnya pengaruh variabel independen adalah sebesar 0,283 atau 28,3% yang sisanya sebesar 71,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.6. Pembahasan

Hasil pengujian secara parsial dengan uji t, menunjukkan bahwa perencanaan anggaran secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Penyebab ketidaksignifikanan pengujian ini karena kemungkinan adanya hambatan yang bersifat *force majeure* dan pegawai yang kurang paham mengenai penatausahaan sehingga menyebabkan penyerapan tidak maksimal atau bahkan tidak dapat terlaksana. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rifai (2016) bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dikarenakan terdapat permasalahan teknis baik pada perencanaan maupun eksekusi anggaran. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ramadhani (2019) dan Elim (2018) yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja.

Hasil pengujian secara parsial dengan uji t, menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Penyebab ketidaksignifikanan pengujian ini karena kemungkinan adanya hambatan yang bersifat *force majeure*, regulasi yang belum turun sehingga proses pelaksanaan menjadi terhambat serta faktor teknis lainnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rifai (2016) bahwa pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dikarenakan pada satker masih mengalami hambatan-hambatan. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ramdhani (2017), Elim (2018), dan Nugroho (2017) yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja.

Hasil pengujian secara parsial dengan uji t, menunjukkan bahwa regulasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Penyebab ketidaksignifikanan pengujian ini karena regulasi yang turun tidak dalam bentuk SOP, serta keterlambatan juknis dari pemerintah pusat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rifai (2016) bahwa regulasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dikarenakan satker terlalu berhati-hati atau terkesan takut untuk mengeksekusi program dan kegiatan walaupun regulasi telah jelas. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ramadhani (2019) dan Alimuddin (2018) bahwa regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja.

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Penyebab ketidaksignifikanan pengujian ini karena pegawai yang dimutasi ditempatkan tidak sesuai dengan bidangnya, jumlah SDM yang terbatas, serta pegawai yang tidak kompeten. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian Alumbida (2016), Nugroho (2017), dan Ramadhani (2019) bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Zarinah (2016) dan Ramdhani (2016) bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Hasil pengujian secara parsial dengan uji t, menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Elim (2018), Priatno (2013), Ramadhani (2019), dan Alimuddin (2018) bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nugroho (2017) dan Sanjaya (2018) bahwa pengadaan barang dan jasa tidak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Hasil pengujian secara simultan dengan uji F, menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, sumber daya manusia, dan pengadaan barang dan jasa secara simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ramadhani (2019) bahwa regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, sumber daya manusia, dan pengadaan barang dan jasa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja. Didukung juga oleh penelitian Elim (2018) bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa terdapat beberapa kendala yang menyebabkan penyerapan anggaran belanja tidak optimal, yaitu perencanaan anggaran yang kurang matang dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan, perubahan harga saat pelaksanaan mengakibatkan anggaran tidak terserap semua, efisiensi anggaran mengakibatkan anggaran tidak terserap optimal karena terdapat sisa anggaran, gagal lelang mengakibatkan anggaran menjadi tidak terserap, dan kesulitan negosiasi.

Berdasarkan hasil wawancara, solusi untuk mengatasi kendala penyerapan anggaran yang tidak optimal adalah dengan menaruh perhatian lebih pada proses perencanaan, sebab perencanaan yang matang dapat menunjang keberhasilan pada saat proses pelaksanaan dan anggaran akan terserap dengan baik. Serta diperlukannya kegiatan monitoring dan evaluasi bagi setiap satuan kerja agar dapat memberikan masukan dan evaluasi apabila terdapat hambatan saat proses pelaksanaan.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

1. Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa secara simultan berpengaruh positif dan signifikan sebesar 28,3% terhadap penyerapan anggaran belanja. Namun perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, dan sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja. Sedangkan pengadaan barang dan jasa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan sebesar 19,7% terhadap penyerapan anggaran belanja.
2. Kendala yang menyebabkan penyerapan anggaran belanja tidak optimal di Pemerintah Kota Cimahi diantaranya adalah perencanaan anggaran yang kurang matang, perubahan harga, efisiensi anggaran, gagal lelang, dan kesulitan negosiasi.
3. Solusi untuk mengatasi penyerapan anggaran yang tidak optimal di Pemerintah Kota Cimahi adalah dengan mengoptimalkan proses perencanaan dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Cimahi disarankan dalam upaya meningkatkan penyerapan anggaran belanja diharapkan dapat memperbaiki proses perencanaan anggaran dengan menerapkan sistem ABK dan memberikan waktu yang cukup untuk menyusun, menelaah hingga merevisi anggaran. Pelaksanaan anggaran sebaiknya dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan selalu mengacu pada DIPA terutama dalam hal penyediaan dana. Terkait regulasi, apabila ada regulasi baru sebaiknya segera dibuatkan SOP dan berikan pemahaman kepada para pegawai dengan cara sosialisasi. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM juga perlu dilakukan. Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian ditempat yang sama atau berbeda dengan menambahkan atau merubah variabel independen, sehingga dapat diketahui faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran belanja. Kemudian dapat menambahkan atau memperbaiki pengukuran atau indikator dalam masing-masing variabel.

Daftar Pustaka

- Alimuddin. (2018). *Analisis Penyerapan Anggaran Di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Dan Kopertis Makassar*. Tesis.
- Alumbida, D. I., Saerang, D. P., & Ilat, V. (2016). *Pengaruh Perencanaan, Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud*. Tesis, 141-151.
- Badan Pengawas Keuangan Pemerintah. (2011). *Paris Review: Misteri Penyerapan Anggaran*. Yogyakarta: BPKP.
- Elim, M. A., Ndaparoka, D. S., & Tomasowa, T. E. (2018). *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Kupang*. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Audit, 3, 46 – 56.
- Hasni, N. T., & Basukianto. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang*. Telaah Manajemen, 13, 33 - 44.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Malahayati, C., Islahuddin, & Basri, H. (2015). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh*. Jurnal Magister Akuntansi, 4, 11- 19.
- Mastuti, D. L., Suharno, & Kristianto, D. (2017). *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran, Lingkungan Birokrasi, Komitmen Manajemen, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, 13, 367 – 377.
- Nugroho, R., & Alfarisi, S. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Melonjaknya Penyerapan Anggaran Quartal Iv Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan)*. Jurnal BPPK, 10, 22-37.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Priatno, P. A. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan*

Kerja Lingkup Pembayaran Kppn Blitar. Jurnal Ilmiah.

- Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019, Mei). *Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia Dan Pengadaan Barang/ Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada Opd Provinsi Sumatera Barat.* Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1, 710-726.
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.* Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 10, 134 – 147.
- Rifai, A., Inapty, B. A., & M, R. P. (2016). *Analisis Faktor–Faktor Yang Memengaruhi Keterlambatan Daya Serap Anggaran (Studi Empiris Pada SKPD Pemprov NTB).* Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 11, 1-10.
- Tessa, S. (2018). *Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran Dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat.* Artikel.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Zarinah, M., Darwanis, & Abdullah, S. (2016). *Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara.* Jurnal Magister Akuntansi, 5, 90- 97.